

#### **Abstrak**

Dalam model pembangunan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi, berbagai prakarsa pembangunan, terutama yang berbasis lahan, berpotensi menjadi konflik, terutama terjadinya tumbukan klaim antara sektor usaha dengan masyarakat. Pada akhirnya, konflik lahan dan kekayaan alam tersebut dapat menjadi "biaya" yang tidak terhindarkan dalam kegiatan pembangunan, dan "biaya" ini kemudian dibebankan kepada para pihak yang berkonflik, baik itu kelompok masyarakat, sektor usaha maupun pemerintah. Studi Biaya Konflik dari Perspektif Pemerintah mencoba memahami bagaimana pemerintah memandang konflik, termasuk di dalamnya beban yang diderita ketika menghadapi konflik. Persepsi pemerintah ini akan mempengaruhi bagaimana respon yang diberikannya dalam menangani kejadian konflik lahan dan kekayaan alam di daerahnya dalam bentuk arah kebijakan dan tindakan.

Kata kunci: biaya konflik; konflik; persepsi; kekayaan alam.

### PENDAHULUAN APA ITU BIAYA KONFLIK

## A. Konflik lahan dan kekayaan alam merupakan biaya yang ditimbulkan ekonomi pertumbuhan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, rencana pembangunan diarahkan untuk mendorong investasi usaha serta memacu ekspor, konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dengan total investasi sebesar Rp. 26.558 triliun pada tahun 2019. Sementara itu Pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 7-8 persen, tingkat pengangguran menjadi sekitar 4-5 persen, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3 dan rasio Gini sebesar 0,36.1

Untuk mencapai target pembangunan tersebut, Pemerintah menetapkan Kebijakan Rencana Program (KRP) Pembangunan yang memuat strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebagai arahan dalam pelaksanaan Dalam implementasinya pembangunan. di lapangan, KRP Pembangunan ternyata belum sepenuhnya efektif menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa sisi, KRP Pembangunan justru menjadi sumber konflik, terutama pada investasi berbasis lahan. Beberapa KRP mendorong terjadinya tumbukan klaim lahan dan kekayaan alam antara masyarakat setempat dengan sektor usaha. Di sini, konflik lahan dan kekayaan alam akhirnya menjadi "biaya" pembangunan yang tidak terhindarkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat, dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada periode 2015-2019 terdapat 2.047 kasus konflik lahan.<sup>2</sup> Pada tahun 2017 terdapat 659 konflik agraria. Sementara itu, laju perkembangan kasus ini melonjak sebesar 78,67 persen dalam periode 2015 ke 2016.

Sedangkan pada tahun 2018 terjadi 410 konflik yang berkenaan dengan lahan seluas 807.117,6 hektar dan melibatkan 87.568 Kepala Keluarga (KK).<sup>3</sup>

### B. Konflik lahan dan sumberdaya alam menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

Konflik lahan dan sumberdaya alam menimbulkan risiko serta biaya atau kerugian para pihak. Sebuah studi tentang biaya konflik lahan dan sumberdaya alam dari perspektif perusahaan sektor kelapa sawit melaporkan bahwa konflik menimbulkan kerugian finansial akibat terganggunya kegiatan produksi. Diperkirakan perusahaan dapat merugi akibat konflik hingga 51 – 88 persen dari biaya operasional perusahaan dan 102 – 177 persen dari biaya investasi per tahun. Estimasi tersebut diukur dari hilangnya laba usaha dan waktu staf yang dialihkan untuk mengatasi konflik.

Sementara itu studi pada tahun 2017 menunjukkan biaya konflik dari perspektif masyarakat. Kerugian utama yang dirasakan masyarakat di sekitar hutan akibat konflik lahan dan kekayaan alam adalah perubahan pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga hasil hutan yang sebelumnya diperoleh secara gratis kini harus dibeli. Estimasi biaya akibat dampak konflik besarnya Rp.51.617.040 per tahun per keluarga yang memiliki kebun sawit atau mengikuti program inti-plasma. Sementara itu keluarga yang tidak memiliki kebun menanggung beban Rp.32.294.844 per tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dan tidak selesai namun berlanjut dalam waktu relatif lama dapat membuat masyarakat terperangkap dalam proses pemiskinan yang kian dalam. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya kemampuan masyarakat untuk menabung ataupun melakukan investasi,

<sup>1</sup> RPJMN 2015 - 2019 Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional

<sup>2</sup> https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200106132321-20-462771/konflik-lahan-era-jokowi-2-kali-lipat-dari-2-periode-sby

<sup>3</sup> https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/konflik-agrar-ia-tak-kunjung-pudar

<sup>4</sup> Daemeter bekerjasama dengan CRU-IBCSD. 2016. The Cost of Conflict in Oil Palm in IndoneSia.

termasuk menyempitnya peluang untuk mobilitas sosial karena terbatasnya peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.<sup>5</sup>

Kedua studi ini menunjukkan bahwa konflik menimbulkan kerugian para pihak yang berkonflik dan berkepentingan. Karena konflik merupakan keniscayaan dalam intervensi pembangunan, keberadaannya memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mandat Pemerintah Pusat dan Pemda dalam penanganan konflik telah tertuang pada TAP MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR tersebut memandatkan Pemerintah Pusat/Daerah untuk. "Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini dan sekaligus mengantisipasi potensi konflik pada masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini" serta "Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaharuan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi"6.

Konsekuensi dari mandat ini adalah bahwa Pemerintah harus melakukan: 1) sinkronisasi kebijakan untuk mengakhiri dualisme hukum atau tumpang tindih kewenangan; 2) landreform Untuk memahami faktor-faktor yang dapat menimbulkan sense of urgency agar pemerintah bersungguh-sungguh menangani konflik lahan dan kekayaan alam dengan mempertimbangkan berbagai pemangku kepentingan yang terdampak dan dapat dilakukan secara tuntas serta menyeluruh, CRU – IBCSD bekerjasama dengan Urban and Regional Development Institute (URDI) telah memprakarsai Studi biaya konflik dari perspektif Pemerintah/Pemda.

## C. Pengetahuan tentang dampak potensial konflik sebagai pertimbangan perencanaan yang lebih baik.

Pemahaman tentang persepsi Pemerintah/ Pemda tentang konflik sangat penting dalam penanganan konflik, terutama dalam mengupayakan dukungan dan komitmen Pemerintah/ Pemda untuk mendorong penyelesaian konflik. Komitmen Pemerintah/ Pemda dalam penanganan konflik sangat diperlukan untuk mengupayakan keberlanjutan penyelesaian konflik yang telah disepakati dan dilaksanakan, serta diharapkan dapat meredam timbulnya konflik baru di kemudian hari.

dengan mengedepankan kepemilikan tanah untuk rakyat; 3) inventarisasi dan pendaftaran tanah untuk *landreform*; 4) pencegahan dan penyelesaian konflik agraria; 5) penguatan kelembagaan dan kewenangan lembaga yang berkompeten; dan 6) pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik agraria.

<sup>5</sup> Perkumpulan KARSA bekerjasama dengan CRU-IBCSD. 2017. Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat.

<sup>6</sup> TAP MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

# METODE: BAGAIMANA STUDI INI DILAKUKAN?

Studi ini difokuskan pada dua pertanyaan pokok yaitu (1) apa dan bagaimana persepsi Pemerintah/Pemda tentang kerugian atau risiko apabila mengabaikan konflik, menunda penanganan konflik, atau menangani konflik namun tidak maksimal?; dan (2) apa serta bagaimana arah kebijakan dan tindakan Pemerintah/Pemda terhadap konflik yang dirasakan menghambat dan/atau mengganggu kelancaran pembangunan?

Tim memaknai konflik lahan dan sumberdaya alam sebagai suatu perselisihan atas lahan dan sumberdaya alam yang telah berdampak luas secara sosial, politik, ekonomi, pertahanan atau budaya. Berangkat dari batasan makna tersebut, maka biaya dan kerugian yang ditanggung pemerintah/pemda mencakup aspek-aspek finansial, sosial, politik, ekonomi, dan budaya, sehingga biaya konflik dalam studi ini bersifat kualitatif. Data dan informasi kuantitatif bertujuan memperkuat penjelasan tentang persepsi kerugian dan risiko Pemerintah/Pemda akibat terjadinya konflik.

Biaya konflik dalam penelitian ini dimaknai sebagai risiko, biaya, kerugian dan konsekuensi yang timbul akibat absennya respon Pemerintah ketika menghadapi gejolak sosial, ekonomi, dan politik, akibat respon umpan balik (feedback) publik terhadap pelaksanaan KRP pembangunan.

Studi ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu studi literatur, wawancara mendalam dan Delphi melalui URDI Learning Forum (ULF). Sedangkan metode analisis yang digunakan antara lain adalah analisis media, pemetaan aktor serta pemangku kepentingan, permodelan dinamika sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait investasi, analisa dampak kebijakan serta analisis kebijakan dan kelembagaan.

Untuk memahami kompleksitas sistem kerja pemerintahan terkait pembagian urusan dan kewenangan dalam penanganan konflik lahan dan sumberdaya alam, studi ini menggunakan pendekatan kapasitas yurisdiksi pemerintah sebagai alat analisis. Tim menganalisis tiga elemen utama, yakni (1) kepemimpinan, komunikasi politik dan manajemen birokrasi yang efektif; (2) penyusunan kebijakan dan pengaturan kelembagaan; serta (3) perencanaan dan penganggaran pembangunan. Ketiga elemen ini digunakan untuk melihat persepsi Pemerintah/Pemda terhadap konflik dan biaya yang ditimbulkannya serta respon yang dilakukan serta tantangan yang dihadapinya.

Selanjutnya, pendekatan studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan KRP Pemerintah/Pemda dan implikasinya, serta memperoleh pemahaman dan pengalaman Pemda dalam penanganan konflik di tingkat lokal. Pemilihan studi kasus didasarkan pada adanya prakarsa dan dukungan Pemda dalam penanganan konflik lahan dan sumberdaya alam. Kasus yang dipilih sebagai objek studi kasus adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kabupaten Lombok Utara dan Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) di Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin dipilih terutama dengan mempertimbangkan adanya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (P2KA) yang mendapat dukungan dari organisasi masyarakat sipil setempat. Sementara, Kabupaten Lombok Utara dipilih dengan pertimbangan adanya kebutuhan kepastian lahan pasca kejadian bencana gempa bumi tahun 2018 serta prioritas pembangunan untuk pengembangan daerah pada sektor pariwisata. Di Kabupaten Lombok Utara juga terdapat prakarsa resolusi konflik yang melibatkan sebuah perusahaan pemegang konsesi HTI dengan masyarakat di tiga desa di Kecamatan Bayan.

Studi ini membatasi rentang waktu pengamatan pada masa pemerintahan Kabinet Kerja tahun 2014-2019 dengan fokus pembahasan utama pada prioritas KRP pembangunan, terutama terkait investasi publik serta investasi swasta dalam dan luar negeri, serta implikasinya pada konflik lahan dan sumber daya alam.

# TENTANG KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PEMERINTAH PERIODE 2015-2019

Nawacita merupakan pedoman pembangunan nasional 2015-2019 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai agenda kerja Pemerintah untuk mewujudkan negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Pemerintah melaksanakan agenda kerja tersebut dengan menetapkan strategi pembangunan yang memuat tiga dimensi pembangunan, yaitu pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, perumahan, karakter), pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri), serta pemerataan dan kewilayahan (antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah yang meliputi desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia).

Dimensi pembangunan tersebut kemudian menjadi panduan dalam perumusan KRP Pembangunan Pemerintah sebagai instrumen pelaksanaan pembangunan. Uraian di atas menjelaskan bahwa dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan serta kewilayahan memiliki keterkaitan dengan konteks konflik yang menjadi fokus studi ini karena kedua dimensi tersebut memuat aspek pengelolaan lahan dan kekayaan alam untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi. Dengan pertimbangan tersebut, KRP Pembangunan yang menjadi pembahasan studi ini meliputi: (1) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan; (2) Percepatan Penyediaan Infrastruktur; (3) Proyek Strategis Nasional (PSN); (4) Paket Kebijakan Ekonomi, (5) Reforma Agraria; dan (6) Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).



Gambar 1:. KRP Pembangunan yang Relevan dengan Studi

# IMPLIKASI KRP PEMBANGUNAN TERHADAP KONFLIK LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM.

Studi literatur yang dilakukan mengumpulkan beberapa kejadian konflik yang terjadi dalam masa pelaksanaan KRP Pembangunan dalam rentang tahun 2015-2019, yaitu:

## A. Kejadian konflik terkait meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur:

Meningkatnya pembangunan infrastruktur selalu meningkatkan kebutuhan akan lahan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mengejar daya saing dan pertumbuhan ekonomi tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan kemudian dipertegas kembali dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Salah satu kasus konflik pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Provinsi NTB. KEK Mandalika yang awalnya dirancang pada era Soeharto, baru dapat dilaksanakan pada era Joko Widodo. Persoalan pembebasan lahan yang berlarut-larut langsung diantisipasi Presiden dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Percepatan tentang Pelaksanaan Provek Strategis Nasional. Dengan Inpres tersebut, pembebasan lahan dapat dilakukan sehingga infrastruktur dasar mulai dapat dibangun, diantaranya instalasi pengolahan air bersih Batu Jai Praya berkapasitas 200 I/detik, Bandara Lombok, Gardu Induk Kuta berkapasitas 150 Kv, Pelabuhan Lembar serta jalan.8

8 https://ads.kontan.co.id/news/mengukur-dampak-pembangu-



Gambar 2. Implikasi KRP Pembangunan yang Memicu Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam

<sup>7</sup> https://setkab.go.id/komitmen-pemerintah-dalam-penyediaan-infrastruktur-perpres-nomor-3-tahun-2016-dan-inpres-nomor-1-tahun-2016/

### B. Kejadian konflik karena meningkatnya konversi lahan pertanian untuk kawasan industri dan infrastruktur.

Gencarnya pembangunan kawasan industri dan infrastruktur membutuhkan lahan yang cukup besar. Kebutuhan lahan ini dipenuhi antara lain dengan mengonversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian ini terlihat dari luas lahan baku sawah yang terus mengalami penurunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 diketahui bahwa luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektar menjadi 7,1 juta hektar. Sementara itu, kemampuan Pemerintah dalam menjaga lahan pertanian lebih rendah dibandingkan dengan laju konversi lahan pertanian. Data Kementerian Pertanian tahun 2014 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah lahan pertanian yang dicetak Pemerintah per tahun hanya 40 ribu hektar, sedangkan rata-rata konversi lahan pertanian secara nasional mencapai 100 ribu hektar.

Konversi lahan pertanian untuk kawasan industri dan infrastruktur juga memicu terjadinya konflik lahan. Kasus seperti ini terjadi di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Para petani setempat menolak rencana pembangunan kawasan industri di area Bongkoran, Wongsorejo. Pembangunan kawasan industri dianggap akan mengurangi lahan pertanian untuk mayoritas penduduknya yang adalah petani. Oleh karena itu, para petani meminta Pemkab Banyuwangi agar membatalkan rencana pembangunan kawasan industri di Kecamatan Wongsorejo. 10

## C. Kejadian konflik karena meningkatnya pelepasan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Upaya Pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan semakin mempermudah mekanisme pelepasan kawasan hutan dan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). KLHK telah

menyediakan 69 juta hektar hutan produksi konversi untuk pengembangan infrastruktur melalui mekanisme IPPKH. Sampai tahun 2015, kawasan hutan produksi konversi yang telah dimanfaatkan mencapai 56,3 juta hektar.<sup>11</sup>

Untuk mendorong kemudahan berusaha dan iklim investasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah mempermudah mekanisme pelepasan kawasan hutan melalui pemangkasan durasi pengurusan serta jumlah syarat yang dipenuhi. Kemudahan ini menjadi "karpet merah" bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis berbasis lahan di Indonesia. Berdasarkan data KLHK, total luasan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit periode 1987-2018 mencapai 5.418.413 hektar. Kemudahan-kemudahan ini justru memiliki konsekuensi terhadap kerugian sosial, lingkungan, serta potensi konflik lahan yang terjadi.12

Kasus pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu contoh gambaran konflik lahan akibat pelepasan kawasan hutan dan izin pinjam pakai. Pemda serta warga Buol menolak SK KLHK Nomor 571 Tahun 2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan Penetapan Batas Area Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi untuk Perkebunan Sawit seluas 9.964 hektar. Penolakan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap berkurangnya alokasi lahan masyarakat serta timbulnya ancaman bencana banjir dan longsor akibat perubahan fungsi kawasan penyangga.<sup>13</sup>

## D. Kejadian konflik karena meningkatnya kebutuhan investasi swasta dalam negeri dan luar negeri.

Dukungan pembiayaan jelas dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, total kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur Indonesia

<sup>9</sup> https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025153705-92-341433/bps-se-but-luas-lahan-pertanian-kian-menurun

<sup>10</sup> https://kbr.id/nusantara/07-2018/petani\_banyuwangi\_tolak\_wongsorejo\_jadi\_ kawasan\_industri/96520.html

<sup>11</sup> https://properti.kompas.com/read/2015/03/31/210000621/Perizinan.Penggunaan.Kawasan.Hutan.untuk.Infrastruktur.Hanya.90.Hari

<sup>12</sup> https://ppid.menlhk.go.id/siaran\_pers/browse/1729

<sup>13</sup> https://www.mongabay.co.id/2019/05/07/menyoal-pelepasan-kawasan-hutan-buat-perusahaan-sawit-di-buol/

mencapai Rp 5.000 triliun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada 2020-2024 mencapai USD 429,7 juta. Sementara itu, APBN hanya mampu membiayai sekitar 8,7 persen dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan BUMN serta perbankan nasional hanya mampu berkontribusi sebesar 30 persen. Masih terdapat gap pembiayaan yang mencapai Rp 3.000 triliun.<sup>14</sup>

Di sini, upaya mengisi gap pembiayaan umumnya ditawarkan kepada investor penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA). Dalam investasi berbasis lahan, khususnya yang dilakukan tanpa memenuhi kaidah-kaidah investasi berkelanjutan, tak jarang upaya ini menimbulkan konflik yang dipicu oleh ketidakpastian status dan hak atas lahan.

Karena itu, upaya Pemerintah untuk menarik investasi perlu dibarengi dengan adanya jaminan kepastian lahan agar investasi dapat berjalan dan akan memberikan pendapatan kepada Pemerintah.

### E. Kejadian konflik karena meningkatnya kebutuhan air dan energi.

Kebutuhan air dan energi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk. Meningkatnya kebutuhan air tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan domestik, irigasi, maupun industri. Sementara itu, maraknya pembangunan yang diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk berdampak pula terhadap peningkatan kebutuhan energi.<sup>15</sup>

Salah satu contoh kasus konflik perebutan pasokan air terjadi di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumsel. Rusaknya bendungan irigasi

## F. Meningkatnya konflik akibat melemahnya katup pengaman (safeguards) sosial dan lingkungan.

Pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan yang berfungsi sebagai katup pengaman untuk mengelola risiko yang tidak terhindarkan dari proses pembangunan, seperti perizinan lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), izin lokasi, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya. Di sisi lain, upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing melalui investasi dan pembangunan infrastruktur, menuntut adanya kemudahan proses perizinan berusaha yang kemudian direspon dengan penghapusan mekanisme Amdal dan IMB sebagai syarat berdirinya kegiatan usaha. Kondisi demikian berpotensi meningkatkan risiko kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat karena berkurangnya kontrol terhadap dampak pembangunan proyek atau investasi.

Contoh kasus melemahnya safeguards sosial dan lingkungan berkenaan dengan pembangunan pabrik semen di Kendeng. Proses pembangunan pabrik semen tersebut menimbulkan berbagai penolakan dari masyarakat dan akademisi karena dinilai menyalahi aturan, yakni penyusunan Amdalnya baru dikerjakan ketika pabrik sudah diresmikan.

primer menimbulkan konflik dan tarik ulur penggunaan air antara petani persawahan dan peternak budi daya perikanan air tawar. Petani pangan menginginkan agar irigasi lancar dan merata, terutama untuk persawahan sementara peternak ikan memerlukan air untuk kolam-kolamnya. Meskipun sudah dilakukan mediasi, konflik tersebut belum dapat diselesaikan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> https://www.liputan6.com/bisnis/read/4003494/ri-butuh-investasi-infrastruktur-usd-4297-miliar-pada-2020-2024

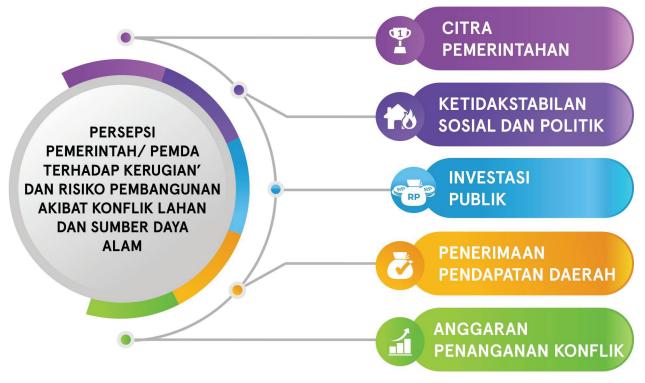
<sup>15</sup> https://www.wartaekonomi.co.id/read102980/pertumbuhan-ekonomi-tingkatkan-kebutuhan-energi-dalam-negeri.html

 $<sup>16\</sup> http://dpr.go.id/berita/detail/id/24474/t/Komisi+IV+Harap+Konflik+Kepentingan+Air+Terselesaikan$ 

# PERSEPSI PEMERINTAH/PEMDA TERHADAP KERUGIAN DAN RISIKO PEMBANGUNAN AKIBAT KONFLIK LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM.

Kerugian risiko pembangunan akibat konflik lahan dan sumber daya alam bersifat multi dimensional. Studi ini menemukan bahwa persepsi pemerintah/Pemda terhadap konflik lahan dan sumber daya alam secara garis besar terbagi dua. Pertama, konflik dipandang sebagai suatu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meraih kepercayaan publik dan investor serta elektabilitas. mempertahankan Peluang diciptakan melalui upaya penanganan konflik yang menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak. Situasi ini secara umum terjadi pada sebagian besar daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel. Adanya penanganan konflik yang dilakukan oleh Plt. Bupati, secara tidak langsung meningkatkan elektabilitasnya ketika mencalonkan diri pada pilkada berikutnya. Peningkatan elektabilitas ini kemudian berdampak terhadap berkurangnya biaya politik yang dikeluarkan.

Pemerintah/Pemda berpandangan bahwa konflik dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L) jika tidak tertangani. Namun persepsi ini terkotak-kotak sesuai dengan kewenangan dari masing-masing K/L. Misalnya, bagi Kemendagri, konflik dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Sementara bagi Kemenko Perekonomian, konflik dianggap sebagai masalah yang timbul dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan bagi KLHK, konflik dianggap sebagai sesuatu yang mengancam kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Sementara itu, bagi Kementerian Pertanian, konflik dianggap sebagai sesuatu yang dapat menganggu kelancaran usaha pertanian. Secara umum dapat dikatakan konflik dipandang sebagai sesuatu yang dapat menganggu pelaksanaan tupoksi dari masing-masing K/L jika tidak tertangani.



Gambar 3. Persepsi Pemerintah/Pemda terhadap Kerugian dan Risiko Pembangunan Akibat Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam

Cara pandang Pemerintah/Pemda ini tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang mengkombinasikan aspek-aspek politis yang dinamis, birokrasi yang rigid (kaku) dan partisipasi masyarakat khususnya dalam sistem elektabilitas pemimpin pemerintahan.

Pembangunan Indonesia yang masih memiliki ketergantungan besar pada sumber ekonomi berbasis sumberdaya alam memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dengan kejadian konflik lahan dan sumberdaya alam. Terdapat setidaknya lima kategori persepsi Pemerintah/Pemda terhadap kerugian dan risiko pembangunan akibat konflik lahan dan sumberdaya alam.

#### A. Konflik dapat menurunkan citra pemerintahan

Pemilihan umum secara langsung merupakan buah perkembangan demokrasi di Indonesia yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang hak suara dalam pemilihan pemimpin pemerintahan. Di sini, konflik sering dijadikan suatu "komoditas" politik yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi citra populis pemimpin maupun calon pemimpin pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Komitmen penanganan konflik pemerintah, khususnya yang telah diterjemahkan menjadi suatu program kegiatan, akan mempengaruhi elektabilitas pimpinan politik dalam konstelasi politik di masa berikutnya. Pada tingkat nasional, elektabilitas calon presiden petahana pada pemilihan presiden tahun 2019 cukup tinggi di daerah-daerah dimana telah dilakukan pembagian sertifikat tanah dalam program Reforma Agraria. Program Reforma Agraria merupakan program yang digadang-gadang sebagai respon terhadap ketimpangan kepemilikan lahan di masyarakat.

Fenomena ini juga terlihat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dimana keseriusan penanganan konflik menjadi salah satu aspek yang mendongkrak elektabilitas wakil bupati petahana pada kontestasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2018.

### B. Konflik menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik

Investordan calon investor yang akan berinvestasi di suatu daerah akan mempertimbangkan faktor stabilitas sosial daerah tersebut. Apabila terdapat ketidakstabilan sosial, daya tarik daerah tersebut sebagai tujuan investasi akan menurun. Inilah yang dimaksud stabilitas sosial sebagai salah satu indikator daya saing investasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dalam indeks kemudahan berusaha (ease of doing business index).

Ketidakstabilan sosial dapat terjadi jika konflik yang ada tidak terselesaikan dan termanifestasi sebagai konflik seperti aksi penyampaian aspirasi, baik secara damai sampai pun aksi anarkis berupa perusakan hingga kekerasan. Studi biaya konflik di sektor perusahaan mencatat adanya berbagai manifestasi konflik yang dapat menganggu operasional perusahaan. Gangguan ini jika tidak tertangani pada akhirnya dapat mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan menganggu kinerja investasi.

Konflik antara PT. BHM pemegang izin konsesi HTI di Kelompok Hutan Sungai Simpang Heran hingga Sungai Bekuyu I, Kabupaten Ogan Komerang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu konflik yang menyebabkan ketidakstabilan sosial. Kegiatan operasional perusahaan di lahan yang selama ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian masyarakat menjadi pangkal konflik. Masyarakat kemudian melakukan aksi penyampaian aspirasi kepada perusahaan, dilanjutkan kepada Pemerintah Daerah hingga kepada Komnas HAM.

#### C. Konflik dapat menghambat investasi publik

Konflik dapat menghambat Pemerintah memenuhi salah satu kewajibannya dalam melakukan investasi publik. Investasi publik berupa pembangunan sarana dan prasarana wilayah umumnya menghadapi hambatan dalam pengadaan lahan.

Salah satu kasus konflik yang menghambat investasi publik terjadi pada masyarakat yang tinggal di Suaka Margasatwa Bentayan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumsel. Masyarakat telah puluhan tahun menghuni wilayah itu dan sudah ada sekolah di sana. Namun karena Suaka Margasatwa termasuk ke dalam wilayah kawasan hutan maka keberadaan warga masyarakat dianggap ilegal. Karena statusnya itu, warga masyarakat di sana tidak dapat merasakan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin maupun Dana Desa (DD).

## D. Konflik mempengaruhi penerimaan pendapatan pemerintah/Pemda baik berupa pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rencana investasi tidaklah berarti tanpa adanya realisasi investasi. Dan kejadian konflik dapat menghambat realisasi masuknya investasi yang telah direncanakan oleh investor. Realisasi investasi yang terhambat akan berimbas pada penerimaan pendapatan pemerintah baik yang berasal dari pajak ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kasus ini dialami di daerah wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di lokasi tersebut banyak lahan telantar yang dibiarkan oleh pemegang HGU dan HGB yang sah. Kemudian masyarakat setempat memanfaatkan lahan tersebut untuk berbagai keperluan termasuk untuk usaha. Ketika saatnya ingin mengembangkan usaha, para pengusaha kesulitan dalam perizinannya karena terbentur dengan status lahan. Selain itu, karena status lahan yang belum jelas (masih sengketa), PemKab Lombok Utara tidak dapat menarik pajak reklame, pajak restoran dan pajak lainnya dari pemilik usaha tersebut.

### E. Konflik dapat meningkatkan anggaran penanganan konflik.

Besaran alokasi anggaran menjadi cerminan prioritas suatu program. Penanganan konflik yang optimal memerlukan dukungan anggaran yang cukup. Sementara itu alokasi anggaran tergantung pada kewenangan yang dimiliki lembaga-lembaga terkait dan sangat tergantung pada prioritas Pemerintah/Pemda.

Di Provinsi Sumatera Selatan, dukungan tersebut ditunjukkan oleh Komisi I DPRD yang memprakarsai penambahan anggaran penanganan konflik. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap banyaknya laporan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pada tahun 2015-2016 yang menyebabkan kebutuhan anggaran penanganan konflik bertambah.

# RESPON DAN TANTANGAN PENANGANAN KONFLIK LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM.

Studi ini selanjutnya menelisik bagaimana Pemerintah/Pemda merespon adanya konflik atau potensi konflik dalam wilayah pemerintahannya. Menggunakan pendekatan kapasitas yurisdiksi pemerintah, studi ini mencoba menelisik respon pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan pembangunan nasional dan respon Pemda yang mengelaborasi kebijakan pusat dalam strategi pembangunan daerahnya. Beberapa temuan kajian ini adalah sebagai berikut:

#### **♦** Kepemimpinan

Komitmen pemimpin pemerintahan merupakan langkah awal upaya penanganan konflik. Baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, komitmen pemimpin membawa arah serta menunjukkan tingkat keseriusan upaya penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam.

Pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam upaya penanganan konflik. Komitmen presiden dalam upaya penanganan konflik terlihat dalam beberapa kebijakan yang berfungsi sebagai katup pengaman (safeguards) untuk mengelola risiko pelaksanaan pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Konflik menjadi salah satu risiko pelaksanaan pembangunan yang jika tidak tertangani dikhawatirkan akan menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan daya saing daerah. Komitmen pemerintah dalam menangani konflik sudah tercantum dengan jelas dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Upaya serius ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan beberapa kebijakan turunannya yang terkait dengan penanganan konflik sosial, perubahan peruntukan dan fungsi hutan, penggunaan kawasan hutan, jaminan luasan lahan pertanian, kebijakan satu peta, penyediaan tanah untuk proyek strategis

nasional, reforma agraria hingga pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Sementara itu, pemerintah daerah menyikapi RKP Pembanggunan Pemerintah pusat dengan respon beragam yang dipengaruhi oleh prioritas pembangunan daerah hingga dinamika politik lokal yang berimbas pada perubahan arah kebijakan Pemda.

Bagi jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Utara, konflik menyebabkan daya saing daerah semakin berkurang dan pada akhirnya akan berdampak pada penurunan pendapatan daerah. Namun demikian konflik tidak menjadi suatu bagian khusus dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Utara 2016 - 2018.

Sementara di tingkat pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, pada masa Gubernur Muhammad Zainul Majdi, penyelesaian konflik lahan menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD 2012-2018. Namun setelah terjadi pergantian Gubernur, konflik lahan tidak lagi tertuang dalam RPJMD. Namun demikian RPJMD memuat respon dari RKP Pembangunan Pemerintah Pusat terkait penanganan konflik sosial melalui program Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial, Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan dan Program Pemanfaatan Ruang.

Kabupaten Musi Banyuasin menyikapi isu konflik lahan dengan tingkatan yang berbeda. Konflik lahan menjadi isu prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2021. Bersama dengan isu kepastian hukum kepemilikan lahan, pencegahan krisis ekologi, dan konflik lahan menjadi bagian dari program reforma Agraria yang digadang-gadang sebagai isu strategis pemerintah.

#### Pengaturan kelembagaan

Pemerintah/Pemda merespon kejadian konflik

melalui pengaturan kelembagaan penanganan konflik. Langkah ini dilakukan secara kongkrit dengan menunjuk beberapa lembaga, baik -lembaga struktural maupun lembaga non-struktural, untuk melakukan upaya penanganan konflik secara parsial sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Hal ini dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Masing-masing K/L diberikan kewenangan untuk menangani konflik yang berpotensi untuk mengganggu kinerja K/Lbersangkutan. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan layanan publik penanganan konflik tenurial dengan pendekatan non-litigasi melalui Direktorat PKTHA. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengatasi konflik di kawasan hutan adalah kemungkinan pemberian hak akses pengelolaan lahan kepada warga masyarakat kurang mampu melalui sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Sementara itu Kementerian Dalam Negeri membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial untuk melaksanakan koordinasi penanganan konflik sosial. Sedangkan Ditjen Perkebunan di Kementerian Pertanian menangani sengketa lahan perkebunan melalui Sub-direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan.

Lembaga non-struktural dilibatkan khususnya dalam menyediakan dukungan pengelolaan konflik yang efisien khususnya yang berkaitan dengan isu strategis seperti pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Konflik Agraria oleh Kantor Staf Presiden, dukungan fasilitasi penyelesaian konflik melalui mediasi atau konsolidasi para pihak seperti yang dilakukan oleh Ombudsman dan Komisi Anti Rasuah (KPK).

Di luar dua kelompok lembaga tersebut, juga terdapat keterlibatan DPR dan DPD RI yang juga menerima laporan pengaduan dan melakukan fasilitasi dan/atau mediasi.

Sementara di daerah, pertimbangan kearifan lokal mengefektifkan pelibatan lembaga

non-struktural. Di Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah memprakarsai pembentukan Majelis Krama Desa melalui Perbub Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Lembaga ini diamanatkan untuk menangani konflik maupun sengketa yang meliputi tindak pidana ringan yang termasuk delik aduan, perkara perdata dan sengketa adat. Sedangkan di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan peraturan daerah tentang Bale Mediasi selain juga membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial.

Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas P2KA) dibentuk oleh Bupati selain juga tim terpadu penanganan konflik sosial. Perhatian khusus pemerintah kabupaten pada Satgas P2KA, keanggotaan Satgas P2KA yang terdiri atas kombinasi personil dari jajaran pemerintah dan LSM menjadikan gugus tugas ini mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan Langkah ketiga yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak konflik adalah mengakomodasi program penanganan konflik dalam rencana pembangunan. Berdasarkan Perpres Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, Pemerintah menyusun program prioritas penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelayanan pertanahan dan upaya penyelesaian konflik tanah yang bersifat struktural guna memberikan kepastian hukum atas tanah, melalui: (1) Review Peraturan Perundangan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria; (2) Identifikasi dan verifikasi kasus-kasus konflik agraria struktural di berbagai sektor strategis; (3) Analisis dan penyusunan pendapat hukum serta pengajuan rekomendasi penyelesaian kasus konflik agraria; (4) Penyusunan review terhadap Hak/Izin Usaha serta merubah tata batas kawasan hutan untuk rakyat; (5) Koordinasi dan supervisi dengan K/L dalam menjalankan rekomendasi penyelesaian kasuskasus konflik agraria; dan (6) Mediasi dan upaya Alternative Dispute Resolution (ADR) lainnya untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di semua sektor strategis.

Ketiga respon pemerintah tersebut menemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaannya:

Target pemerintah yang dicanangkan dalam RPJMN sangat ambisius. Hal ini terlihat jelas pada pencapaian target reforma agraria yang masih dianggap belum tercapai di periode pertama jabatan Presiden Joko Widodo. Reforma Agraria ditargetkan berupa legalisasi aset pada lahan seluas 4,5 juta hektar dan redistribusi tanah sebesar 4,5 juta hektar. Target legalisasi aset sudah tercapai, namun target redistribusi aset baru mencapai 1, 44 juta juta hektar.

Walaupun telah dilakukan pengaturan kelembagaan yang cukup konkrit, dalam pelaksanaannya masing-masing K/L kurang berkoordinasi dalam mengeluarkan kebijakan. Akibatnya terjadi tumpang tindih dan pertentangan antar kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini juga terjadi antara jalur koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah.

Mengingat masing-masing Pemda memilki kapasitas yang berbeda dalam merespon KRP Pembangunan Pemerintah, maka hal ini menjadi salah satu tantangan.

Pemetaan potensi konflik belum terakomodasi dalam rencana pembangunan. Dari sisi Pemerintah/Pemda perencanaan, perlu menyusun pemetaan konflik pada tiap wilayah untuk mengindentifikasi potensipotensi timbulnya konflik. Deteksi dini akan memudahkan Pemerintah/ Pemda dalam merancang pendekatan yang perlu dilakukan untuk penanganan konflik. Pemetaan konflik dan deteksi dini ini dapat dijadikan dasar penyusunan rencana penanganan konflik yang akan diakomodasi dalam rencana pembangunan.

Tantangan-tantangan di atas muncul karena adanya faktor politis terkait dengan pergantian pemimpin pemerintahan, faktor birokrasi yang *rigid* karena adanya berbagai peraturan perundangan yang mengaturnya, dan faktor keberlanjutan yang tidak terakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan.

# REKOMENDASI

Konflik lahan dan sumberdaya alam sebagai implikasi dari kegiatan pembangunan memerlukan strategi penanganan yang menyeluruh. Tidak dapat dipungkiri, kebijakan lintas sektor dan lintas periode pemerintahan kerap bertumpah tindih. Identifikasi KRP Pembangunan sektoral Pemerintah/Pemda tentang potensi keterjadian konflik dengan lembaga sektoral tersebut akan membantu dalam upaya penyelesaian konflik.

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk penyelesaian konflik lahan dan sumberdaya alam yang dirumuskan berdasarkan temuan-temuan diatas:

- Pemerintah/Pemda perlu mempertimbangkan penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam dalam kebijakan pembangunan di masa yang akan datang, khususnya kebijakan lembaga-lembaga sektoral yang berkaitan dengan konflik lahan dan sumberdaya alam. Jika memungkinkan, prakarsa penyelesaian konflik itu dituangkan dalam dan diperkuat dengan kebijakan baru, khususnya kebijakan lembaga-lembaga sektoral yang berkaitan dengan konflik lahan dan sumberdaya alam. Dengan demikian, resolusi konflik yang telah tercapai dan telah dilaksanakan dapat tetap terjaga keberlanjutannya.
- Pemerintah/Pemda perlu meningkatkan komitmennya terhadap upaya penanganan konflik lahan dan sumberdaya alam dan tidak hanya menjadikannya sekedar motif politis jangka-pendek dalam pilkada. Motif politis seperti itu sangat berisiko khususnya karena

dapat memicu konflik baru jika komitmen penanganan konflik ditinggalkan ketika terjadi pergantian pemimpin.

- 3. Mandat TAP MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam perlu dijadikan pedoman dalam upaya penanganan konflik sembari pada saat yang sama mengantisipasi potensi munculnya konflik baru serta dukung pembiayaan pelaksanaan program penanganan konflik.
- 4. Pemerintah/Pemda perlu menangani konflik lahan dan sumberdaya alam secara menyeluruh. Dalam arti perlu penyelesaian secara struktural pada akar permasalahan yang antara lain terjadi sebagai respon dari tumpang tindih kebijakan, ketimpangan sosial ekonomi, kerusakan lingkungan serta berbagai aspek lainnya sesuai konteks lokal tempat terjadinya konflik.

Pemerintah/Pemda perlu melakukan pembenahan lembaga-lembaga yang menangani konflik lahan dan sumberdaya alam. Diperlukan lembaga independen yang memiliki kewenangan lintas sektoral dan terdiri dari berbagai unsur dalam penanganan konflik. Faktor utama keberadaan lembaga independen tersebut adalah bebas dari aspek politis, adaptif tanpa birokrasi yang *rigid*, dan berkelanjutan dalam pembiayaan operasionalnya. Lembaga ini dapat berperan sebagai penentu standar dalam penanganan konflik dan pembentuk kesadaran terkait pentingnya penanganan konflik baik di pusat maupun di daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku, Jurnal, dan Laporan

- Apindo. 2016. *Policy Brief*: Paket Kebijakan Ekonomi dan Simplikasi Regulasi Pusat-Daerah dalam Mendukung Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
- Asikin, Zainal. 2014. Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Kawasan Pariwisata Lombok. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2018. Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Hukum dan Evaluasi Hukum Terkait Pertanahan.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional dan KPK. 2018. Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Daemeter bekerjasama dengan CRU-IBCSD. 2016. The Cost of Conflict in Oil Palm in Indonesia.
- Daryono Subagyo, dkk. 2013. *Regional Competitiveness and Its Implication for Development*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14 No. 2, Desember 2013.
- Direktorat Litbang KPK. 2018. Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018.
- Ditjend Anggaran Kementerian Keuangan. 2019. Informasi APBN 2019: APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- Ditjend Perimbangan Kementerian Keuangan. 2014. Kajian Atas Kebijakan Penguatan Daya Saing Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- Ditjend Perkebunan Kementerian Pertanian. 2018. Laporan Tahun 2018 Direktorat Perlindungan Perkebunan.
- Ditjend Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Laporan Kinerja 2018 Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.
- DLHP Provinsi Sumatera Selatan. 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

- Ekawati, dkk. 2019. Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 3.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2015. Strategi Nasional Reformasi Regulasi, Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib.
- KNPA. 2015. *Policy Paper*: Usulan Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria.
- Komnas HAM. 2018. Kertas Posisi: Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dalam Kerangka Reforma Agraria dengan Berbasis HAM.
- Konsorsium KpSHK. 2018. Strategi Percepatan TORA dan Perhutanan Sosial.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2016. Catatan Akhir Tahun: Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan.
- \_\_\_\_\_\_. 2018. Catatan Akhir Tahun: Masa Depan Reforma Agraria Melampui Tahun Politik.
- Komisi II DPR RI. 2019. Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.
- Komisi II DPR RI. 2019. Laporan Kunjungan Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.
- KPPIP. 2019. Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2019.
- KPPOD. 2017. Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016: Survei Pemeringkatan 32 Ibukota Provinsi di Indonesia.
- Ombudsman RI. 2018. Laporan Tahunan 2018.
- Michael Kitson et all. 2004. Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept?. Regional Studies, Vol. 38.9, pp. 991-999, December 2004.
- Mujiburohman, D A. 2018. Potensi Permasalahan Pendaftaran Sistematik Lengkap (PTSL). Jurnal Bhumi Vol. 4 No. 1, Mei 2018.
- Mulyani, Lilis. 2014. Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia. Jurnal Bhumi No. 39, April 2014.

- Nanda, D A dan Suhadak. 2018. Pengaruh *Ease* of *Doing Business* dan *Business Confidence* terhadap *Global Competitiveness Index*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 62 No. 2, September 2018.
- Perkumpulan KARSA bekerjasama dengan CRU-IBCSD. 2017. Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat.
- Puspijak. 2014. Hutan untuk Rakyat: Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan. LKiS, Yogyakarta.
- Ray, Debraj and Esteban Joan. 2017. Conflict and Development. *Annual Review of Economics*, 9, 263–93.
- Saleh, dkk. 2012. Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Kontemporer. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- URDI bekerjasama dengan CRU-IBCSD. 2019.
  Tata Ruang, Kepastian Lahan dan Konflik
  Tumbukan Klaim Lahan di Pulau Sumatera dan
  Kalimantan: Diantara Tuntutan Pertumbuhan
  Ekonomi, Dinamika Kebijakan dan Laju
  Investasi Berbasis Lahan

#### B. Dokumen

- BPS Kabupaten Lombok Utara. 2019. Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2019.
- BPS Kabupaten Musi Banyuasin. 2019. Musi Banyuasin Dalam Angka 2019.
- RPJMD Kabupaten Lombok Utara tahun 2016-2021.
- RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022.
- RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.
- RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023.
- RPJMN 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional.

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

Tap MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

- UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan.
- UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangangan Konflik Sosial.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
- Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional.
- Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

#### D. Materi Presentasi

Paparan Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Ditjen Perkebunan – Kementerian Pertanian tanggal 20 November 2013 dalam Workshop Resolusi Konflik dan Expo CSR Perkebunan dan Kehutanan.

- Paparan Kepala Bidang Iklim Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal tanggal 21 Oktober 2019 dalam URDI *Learning Forum*.
- Paparan Mulya Amri tanggal 3 Mei 2018 dalam Seminar Peningkatan Daya Saing Provinsi Lampung melalui Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah.

#### E. Berita dari Internet

- Aktual.com. 2016. Konflik Lahan, Pemukiman dan Lahan Desa Transmigrasi Sumsel Digusur. https://aktual.com/konflik-lahan-pemukiman-dan-lahan-desa-transmigran-sumsel-digusur/, diakses tanggal 5 November 2019
- Ali, Zulfikar. 2016. Komitmen Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur: Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016?. https://setkab.go.id/komitmen-pemerintah-dalam-penyediaan-infrastruktur-perpres-nomor-3-tahun-2016-dan-inpres-nomor-1-tahun-2016/, diakses tanggal 28 Oktober 2019
- Aminah Nur, Andi. 2017. Kasus Tanah Dominan Dilaporkan ke Ombudsman NTB. https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/10/omlkz2384-kasus-tanah-dominan-dilaporkan-ke-ombudsman-ntb, diakses tanggal 27 Oktober 2019
- Antara. 2019. Tangani 167 Konflik Agraria,
  Pemerintah Bentuk 'Desk' Baru.
  https://www.cnnindonesia.com/
  nasional/20190613090819-20-402890/
  tangani-167-konflik-agraria-pemerintahbentuk-desk-baru, diakses tanggal 28 Oktober
  2019
- Arifianto, Hermawan. 2018. Petani Banyuwangi Tolak Wongsorejo Jadi Kawasan Industri. https://kbr.id/nusantara/07-2018/petani\_ banyuwangi\_tolak\_wongsorejo\_jadi\_kawasan\_ industri/96520.html, diaskes tanggal 28 Oktober 2019
- Berita Pagi. 2017. Kami Butuh Investor Tapi Tidak Sengsarakan Masyarakat. http://beritapagi. co.id/2017/09/26/kami-butuh-investor-tapitidak-sengsarakan-masyarakat.html, diakses tanggal 6 November 2019
- Biro Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN. 2018. Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh. https://kominfo.go.id/content/detail/13688/

- reforma-agraria-menjamin-pemerataansosial-ekonomi-masyarakat-secaramenyeluruh/0/artikel\_gpr, diakses tanggal 4 November 2019
- Biro Humas KLHK. 2017. Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan. https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel\_gpr, diakses tanggal 4 November 2019
- Biro Humas KLHK. 2019. Pelepasan Kawasan Hutan Tahun 2015–2018 Seluas 242.392 Ha. https:// ppid.menlhk.go.id/siaran\_pers/browse/1729, diakses tanggal 15 November 2019
- CNN Indonesia. 2020. Konflik Lahan Era Jokowi 2 Kali Lipat dari 2 Periode SBY. https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20200106132321-20-462771/konfliklahan-era-jokowi-2-kali-lipat-dari-2-periodesby, diakses tanggal 8 Januari 2020
- Danial. 2019. Komite I DPD RI Bahas Sengketa Tanah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. https://www.harianterbit.com/ nasional/read/113326/Komite-I-DPD-RI-Bahas-Sengketa-Tanah-dengan-Kementerian-Agraria-dan-Tata-Ruang, diakses tanggal 26 November 2019
- Deny, Septian. 2019. RI Butuh Investasi Infrastruktur USD 429,7 Miliar pada 2020–2024. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4003494/ri-butuh-investasi-infrastruktur-usd-4297-miliar-pada-2020-2024, diakses tanggal 10 Desember 2019
- Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. 2019. Istilah dan Pengertian di Perlindungan Perkebunan. http://perlindungan.ditjenbun.pertanian.go.id/web/page/title/315045/istilah-dan-pengertian-di-perlindungan-perkebunan?post\_type=informasi, diakses tanggal 2 November 2019
- Direktorat PKPS KLHK. 2019. Statistik Perhutanan Sosial. http://pkps.menlhk.go.id/#statistik, diakses tanggal 4 November 2019
- Direktorat PKTHA KLHK. 2019. Pengaduan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat. http://pskl.menlhk. go.id/pktha/pengaduan/frontend/web/ index.php?r=site%2Fdirektorat-pktha, diakses tanggal 5 November 2019

- DISLHK. 2018. Lokakarya Pokja Perhutanan Sosial Provinsi NTB. https://dislhk.ntbprov.go.id/2018/03/19/lokakarya-pokja-perhutanan-sosial-provinsi-ntb/, diakses tanggal 2 November 2019
- Ditjen Bina Adwil Kemendagri. 2019. Data Rekapitulasi Konflik Pertanahan Yang Difasilitasi Kemendagri Tahun 2017 S/D 2018. https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/ wp-content/uploads/2019/01/Data-Konflik-Pertanahan.pdf, diakses tanggal 7 November 2019
- Djauhari. 2017. Dinamika Perhutanan Sosial di HKM Santong dan Sambelia. http://kpshk. org/2017/02/14/dinamika-perhutanan-sosialdi-hkm-santong-dan-sambelie/, diakses tanggal 27 Oktober 2019
- DPD RI. 2019. Badan Akuntabilitas Publik DPD RI. https://dpd.go.id/alatkelengkapan/badan-akuntabilitas-publik, diakses tanggal 27 November 2019
- DPD RI. 2016. BAP DPD RI Fasilitasi Sengketa Lahan Warga Transmigrasi Musi Banyuasin. https://dpd.go.id/berita-165-bap-dpd-ri-fasilitasi-sengketa-lahan-warga-transmigran-musi-banyuasin, diakses tanggal 28 November 2019
- DPMPTSP. 2019. Pemprov Bentuk Satgas. https://www.investasi-perizinan.ntbprov. go.id/2017/08/22/pemprov-bentuk-satgas/, diakses tanggal 27 Oktober 2019
- DPR RI. 2019. Komisi DPR. http://www.dpr.go.id/akd/komisi, diakses tanggal 27 November 2019
- Fatah, Darul. 2018. Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan. https://indopos.co.id/ read/2018/11/25/156610/presiden-serahkansk-perhutanan-sosial-di-sumatera-selatan/, diakses tanggal 5 November 2019
- Friana, Hendra. 2018. Pemerintah Luncurkan Kebjiakan Satu Peta Hari Ini, Apa Manfaatnya?. https://tirto.id/pemerintah-luncurkankebijakan-satu-peta-hari-ini-apa-manfaatnyadbEE, diakses tanggal 15 Desember 2019
- Gumiwang, Ringkang. 2019. Mandalika: Sirkuit untuk MotoGP yang Mangkrak Sejak Era Soeharto. https://tirto.id/mandalika-sirkuit-untuk-motogp-yang-mangkrak-sejak-era-soeharto-dhHJ, diakses tanggal 7 November 2019

- Gunawan. 2018. Tantangan Pelaksanaan Reforma Agraria. https://kumparan.com/bung-gunawan/tantangan-pelaksanaan-perpres-reforma-agraria-1540807924377389488, diakses tanggal 30 Oktober 2019
- Hidayatullah, Arsito dkk.. 2019. Sekjen KPA
  Dewi Kartika: Reforma Agraria, Kami Akan
  Tagih Presiden. https://www.suara.com/
  wawancara/2019/10/31/160647/sekjen-kpadewi-kartika-reforma-agraria-kami-akantagih-presiden?page=all, diakses tanggal 5
  November 2019
- Hulu, Sabarudin. 2019. Menyelesaiakan Pengaduan Maladministrasi Dengan Menyenangkan. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-menyelesaikan-pengaduan-maladministrasidengan-menyenangkan, diakses tanggal 15 Oktober 2019
- Humas ATR/BPN. 2018. Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target. https://kominfo.go.id/content/ detail/12924/program-ptsl-pastikanpenyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuaitarget/0/artikel\_gpr, diakses tanggal 27 Oktober 2019
- Idris, Muhammad. 2019. Kemendes Cegah Konflik Lewat Pendidikan Bina Damai. https://news. detik.com/berita/d-4596319/kemendescegah-konflik-lewat-pendidikan-bina-damai, diakses tanggal 5 November 2019
- Irwanto. 2018. Biaya Pemandaman Karhutla di Sumsel Tembus Rp 1 Triliun. https://www. merdeka.com/peristiwa/biaya-pemadamankarhutla-di-sumsel-tembus-rp-1-triliun.html, diakses tanggal 5 November 2019
- Jarot Bayu, Dimas. 2015. Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Infrastruktur Hanya 90 Hari. https://properti.kompas.com/ read/2015/03/31/210000621/Perizinan. Penggunaan.Kawasan.Hutan.untuk. Infrastruktur.Hanya.90.Hari, diakses tanggal 28 Oktober 2019
- JPNN. 2018. Gakkum KLHK Sudah Tangani 2.688
  Pengaduan dari Masyarakat. https://www.jpnn.
  com/news/gakkum-klhk-sudah-tangani-2688pengaduan-dari-masyarakat, diakses tanggal 5
  November 2019
- Kantor Staf Presiden. 2019. Mempercepat Penanganan Konflik Agraria. http://ksp.go.id/ mempercepat-penanganan-konflik-agraria/, diakses tanggal 27 Oktober 2019

- Karunianti, Arum. 2018. SK Perhutanan Sosial Telah Dibagikan di Sumatera Selatan. https:// foresteract.com/sk-perhutanan-sosial-telahdibagikan-di-sumatera-selatan/, diakses tanggal 5 November 2019
- Katadata. 2019. Konflik Agraria Tak Kunjung Pudar. https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2019/09/10/konflik-agraria-takkunjung-pudar, diakses tanggal 28 Oktober 2019
- Kemenkumham. 2017. Sengketa Desa Lias Lombok Utara Berakhir Perdamaian. https:// ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/ berita-utama/2715-sengketa-lahan-desa-liaslombok-utara-berakhir-perdamaian, diakses tangal 2 November 2019
- Kemenkumham. 2019. Komnas HAM Selenggarakan Rapat Mediasi Sengketa Lahan Antara Kanwil Kemenkumham NTB dengan Pemda Lombok Utara. 2019. https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2986-komnas-ham-selenggarakan-rapat-mediasi-sengketa-lahan-antara-kanwil-kemenkumham-ntb-dengan-pemda-lombok-utara, diakses tanggal 2 November 2019
- Kementerian ATR/BPN. 2018. Evaluasi Kinerja Reforma Agraria dan Rencana 2019. https:// www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/ evaluasi-kinerja-reforma-agraria-2018dan-rencana-2019-77782, diakses tanggal 3 November 2019
- Khalid, Idham. 2019. Belum Dibebaskan, Lahan MotoGP Dipagari Warga. https://regional.kompas.com/read/2019/09/30/22262561/belum-dibebaskan-lahan-motogp-dipagariwarga?page=all, diakses tanggal 3 November 2019
- Komnas HAM. 2019. Tentang Komas HAM. https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html, diakses tanggal 25 Oktober 2019
- Kontan.co.id. 2018. KPK Turut Bantu Selesaikan Konflik Agraria Trenggalek. https://nasional. kontan.co.id/news/kpk-turut-bantuselesailkan-konflik-agraria-trenggalek, diakses tanggal 7 November 2019

- Kurniawan, Dian. 2019. Komnas HAM Sebut Pengaduan Sengketa Tanah Tiap Tahun Capai 800 Kasus. https://www.liputan6.com/ news/read/3909940/komnas-ham-sebutpengaduan-sengketa-tanah-tiap-tahun-capai-800-kasus, diakses tanggal 2 November 2019
- Mahardika, Hery. 2017. Puluhan Hektare Tanah Rakyat Lombok Utara Dibancak. https:// radarlombok.co.id/puluhan-hektare-tanahrakyat-lombok-utara-dibancak.html, diakses tanggal 2 November 2019
- Masnun. 2018. Lombok Utara Gelar Sosialisasi Program PTSL. https://mataram.antaranews. com/berita/36636/lombok-utara-gelarsosialisasi-program-ptsl, diakses tanggal 3 November 2019
- MJ, Darfian. 2017. OKI Model Percontohan Penyelesaian Sengketa Lahan di Indonesia. http://www.rmolsumsel.com/ read/2017/02/09/66106/OKI-Model-Percontohan-Penyelesaian-Sengketa-Lahan-Di-Indonesia-, diakses tanggal 6 November 2019
- Mubaonline. 2019. Pemkab Muba Dorong Berjalannya Program Perhutanan Sosial. https://www.mubaonline.com/berita/ pemkab-muba-dorong-berjalanya-programperhutanan-sosial-muba23827, diakses tanggal 5 November 2019
- Niken. 2019. Upaya Komnas HAM Tangani Konflik Agraria di NTT. https://www.komnasham. go.id/index.php/news/2019/9/5/1134/upayakomnas-ham-tangani-konflik-agraria-di-ntt. html, diakses tanggal 1 November 2019
- Nisa, Khairun Rizlia. 2019. Ditjen Polpum Apreasisi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. https://www.merdeka.com/peristiwa/ditjenpolpum-apresiasi-tim-terpadu-penanganankonflik-sosial.html, diakses tanggal 15 November 2019
- Nugraha, Indra. 2017. Implementasi Reforma Agraria Masih Jauh dari Harapan. https://www. mongabay.co.id/2017/10/31/implementasireforma-agraria-masih-jauh-dari-harapan/, diakses tanggal 30 Oktober 2019

- Nugraha, Indra. 2019. Pemerintah akan Bentuk Divisi Penanganan Konflik Agraria Lintas Kementerian dan Lembaga. https://www.mongabay.co.id/2019/06/13/pemerintah-akan-bentuk-divisi-penanganan-konflikagraria-lintas-kementerian-dan-lembaga/, diakses tanggal 10 November 2019
- Nur Aminah, Andi. 2018. Konflik Agraria Masih Marak di Sumsel. https://www.republika. co.id/berita/nasional/daerah/18/04/23/ p7nan2384-konflik-agraria-masih-marak-disumsel, diakses tanggal 4 November 2019
- Nur Zahra, Ulfa. 2016. Proyek Infrastruktur Jokowi Jadi Biang Konflik Agraria. https:// tirto.id/proyek-infrastruktur-jokowi-jadibiang-konflik-agraria-b5yx, diakses tanggal 3 November 2019
- Parlementaria Terkini. 2019. Komisi IV Harap Konflik Kepentingan Air Terselesaikan. http://dpr.go.id/berita/detail/id/24474/t/Komisi+IV+Harap+Konflik+Kepentingan+Air+Terselesaikan, diakses tanggal 15 Januari 2020
- Parmansyah, Edy. 2019. Tertinggi Turunkan Kemiskinan, Muba Bentuk Pelayanan Data Terpadu. https://www.detiksumsel.com/ tertinggi-turunkan-kemiskinan-muba-bentukpelayanan-data-terpadu/, diakses tanggal 5 November 2019
- Pemkab Lombok Utara. 2019. Sosialisasi Program PTSL. http://lombokutarakab.go.id/v1//v1/berita/359-bupati-buka-acara-sosialisasi-program-ptsl-klu, diakses tanggal 3 November 2019
- Prioritas.co.id. 2019. Pemkab Muba Dukung
  Penyelesaian Sengketa Agraria Melalui MoU
  Antara Masyarakat Desa Pulai Gading dengan
  PT BPP. https://prioritas.co.id/2019/09/20/
  pemkab-muba-dukung-penyelesaiansengketa-agraria-melalui-mou-antaramasyarakat-desa-pulai-gading-dengan-ptbpp/, diakses tanggal 5 November 2019
- Pulau Sumbawa News. 2019. Sengketa Agraria Warga Doropeti vs PT SMS, Gubernur NTB Diminta Turun Tangan. https://pulausumbawanews.net/index. php/2019/12/03/sengketa-agraria-wargadoropeti-vs-pt-sms-gubernur-ntb-dimintaturun-tangan/, diakses tanggal 3 November 2019

- Radbogmin2. 2018. Kemendes PDTT Targetkan 341.552 Lahan Tersertifikasi. https://www.radarbogor.id/2018/09/07/kemendes-pdtt-targetkan-341-552-lahan-tersertifikasi/, diakses tanggal 5 November 2019
- Rakhman, Fathul. 2018. Ketika Perusahaan Pemasok Tembakau Berkonflik Lahan dengan Warga Lombok (Bagian 2). https://www.mongabay.co.id/2018/10/25/ketika-perusahaan-pemasok-tembakau-berkonflik-lahan-dengan-warga-lombok-bagian-2/, diakses tanggal 2 November 2019
- Redaksi Beritasriwijaya. 2018. Pemerintah Perlu Hati-Hati Menentukan Lahan TORA. http://beritasriwijaya.co.id/2018/10/20/pemerintah-perlu-hati-hati-menentukan-lahan-tora/, diakses tanggal 27 Oktober 2019
- Redaksi Jayantara News. 2018. Terkait Sengketa Lahan Warga Tomang NTB, DPR RI Desak PT EST Tidak Lagi Perkarakan Warga. https:// www.jayantaranews.com/2018/01/terkaitsengketa-lahan-warga-tomang-ntb-dpr-ridesak-pt-est-tidak-lagi-perkarakan-warga/, diakses tanggal 5 November 2019
- Redaksi Lombok Post. 2019. Di Bawah Bayang-Bayang PT Gili Trawangan Indah. https:// www.lombokpost.net/2019/12/11/di-bawahbayang-bayang-pt-gili-trawangan-indah/, diakses tanggal 4 Januari 2020
- Redaksi Lombok Post. 2019. Sengketa Lahan Ancam Investasi. https://www.lombokpost. net/2019/08/09/sengketa-lahan-ancaminvestasi/, diakses tanggal 4 November 2019
- Redaksi Lombok Post. 2019. Sengketa Lahan Jalan Lingkar Utara Tuntas. https://www. lombokpost.net/2019/03/25/sengketa-lahanjalan-lingkar-utara-tuntas/, diakses tanggal 2 November 2019
- Redaksi Lombok Post. 2019. Tiga Investor Global Hub Angkat Kaki. https://www.lombokpost. net/2019/04/05/tiga-investor-global-hubangkat-kaki/, diakses tanggal 2 November 2019
- Ridhwan, Dwiki dkk. 2019. 3 Contoh Kasus Konflik Lahan dan Bagaimana Kebijakan Satu Peta Dapat Memperbaikinya. https://wri-indonesia.org/id/blog/3-contoh-kasus-konflik-lahan-dan-bagaimana-kebijakan-satu-peta-dapat-memperbaikinya, diakses tanggal 15 Desember 2019

- Rivai, Minnie dkk. 2019. Menyoal Pelepasan Kawasan Hutan buat Perusahaan Sawit di Buol. https://www.mongabay.co.id/2019/05/07/ menyoal-pelepasan-kawasan-hutan-buatperusahaan-sawit-di-buol/, diakses tanggal 3 Januari 2020
- Sanada Sipayung, Indra. 2019. 5 Alasan Kenapa Indonesia Butuh Investasi Asing. https://kumparan.com/guru-bangsa/5-alasan-kenapa-indonesia-butuh-investasi-asing-1552180369093698323, diakses tanggal 14 Oktober 2019
- Senovlan, Heru. 2019. Tujuh Tersangka Perambahan Hutan BKSDA, Tungu Jadwal Sidang. https://www.detiksumsel.com/tujuhtersangka-perambahan-hutan-bksda-tunggujadwal-sidang/, diakses tanggal 5 November 2019
- Septa, Karnia. 2018. Kabupaten Lombok Utara Alami Kerugian Rp 2,7 Triliun Akibat Gempa. https://regional.kompas.com/ read/2018/08/13/13374151/kabupatenlombok-utara-alami-kerugian-rp-27-triliunakibat-gempa, diakses tanggal 2 November 2019
- Setiawan, Alfurqon. 2019. Membangun Indonesia dari Pinggiran Desa. https://www.desapedia.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/, diakses tanggal 27 Desember 2019
- Sri. 2016. Penyelesaian Sengketa Konflik Lahan Menjadi Agenda Prioritas Komisi 1 di Tahun 2016. http://www.rmolsumsel.com/ read/2016/01/02/42913/Penyelesaian-Sengketa-Lahan-Menjadi-Agenda-Prioritas-Komisi-1-di-Tahun-2016-, diakses tanggal 20 Oktober 2019
- Sripoku.com. 2014. Ombudsman Siap Mediasi Sengketa IAIN dengan Warga Lr. Tasuba. https://palembang.tribunnews. com/2014/11/13/ombudsman-siap-mediasisengketa-iain-dengan-warga-Ir-tasuba, diakses tanggal 6 November 2019
- Sripoku.com. 2018. Atasi Keterbatasan Lahan, Begini Skema yang Akan Dilakukan Pemprov Sumsel. https://palembang.tribunnews. com/2018/03/26/atasi-keterbatasan-lahanbegini-skema-yang-akan-dilakukan-pemprovsumsel, diakses tanggal 5 November 2019

- Sripoku.com. 2018. Warga Pedamaran Tuntut Janji, Kelompok Tani Belum Dapatkan Plasma. https://palembang.tribunnews. com/2018/12/28/warga-pedamaran-tuntutjanji-kelompok-tani-belum-dapatkan-plasma, diakses tanggal 6 November 2019
- Sulis. 2019. Gelar Aksi di Pemprov Sumsel. Masa Tuntut Tinjau Ulang Izin HGU. https://palpres. com/gelar-aksi-di-pemprov-sumsel-massatuntut-tinjau-ulang-hgu/, diakses tanggal 5 November 2019
- Sulmaihati. 2019. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Tumbuhkan Industri Baru. https://katadata.co.id/berita/2019/03/05/percepatan-pembangunan-infrastruktur-tumbuhkan-industri-industri-baru, diakses tanggal 27 Desember 2019
- Sumatera News. 2019. Sengketa Terus Berlanjut, Petani Portal Jalan PT GPI. https:// sumateranews.co.id/sengketa-terusberlanjut-petani-portal-jalan-pt-gpi/, diakses tanggal 5 November 2019
- Sumselupdate. 2019. Soal Sengketa Lahan di Desa Danau Cala dengan PT Medco, Ini Sikap Pemkab Muba. https://sumselupdate.com/ soal-sengketa-lahan-di-desa-danau-caladengan-pt-medco-ini-sikap-pemkab-muba/, diakses tanggal 6 November 2019
- Thomas, Fabian. 2018. Potensi Konflik Agraria di Balik Kebijakan Satu Peta. https://tirto.id/ potensi-konflik-agraria-di-balik-kebijakansatu-peta-ala-jokowi-db2d, diakses tanggal 15 Desember 2019
- Tim Koran NTB. 2019. Ombudsman NTB
  Tindaklanjuti Kasus Lahan Mata Air Ambung.
  https://koranntb.com/2019/09/27/
  ombudsman-ntb-tindaklanjuti-kasuslahan-mata-air-ambung/, diakses tanggal 2
  November 2019
- Tribunsumsel.com. 2017. Warga Miliki Lahan
  Transmigrasi Sejak 1995 tapi Cuma di Atas
  Sertifikat, Aslinya Lahan Tidak Ada. https://
  sumsel.tribunnews.com/2017/04/27/wargamiliki-lahan-transmigrasi-sejak-1995-tapicuma-di-atas-sertifikat-aslinya-lahan-tidakada, diakses tanggal 5 November 2019

- Turmuzi. 2018. Kepala LHK NTB: Program
  Perhutanan Sosial Sudah Berjalan. https://
  www.cendananews.com/2018/04/kepalalhk-ntb-program-perhutanan-sosial-sudahberjalan.html, diaskes tanggal 3 November
  2019
- Ujang. 2017. Konflik Agraria di Sumsel Perlu Penanganan Serius. https://sumsel. antaranews.com/berita/315691/konflikagraria-di-sumsel-perlu-penanganan-serius, diakses tanggal 5 November 2019
- Wahyuni, Tri. 2018. BPS Sebut Luas Lahan Pertanian Kian Menurun. https:// www.cnnindonesia.com/ekono mi/20181025153705-92-341433/bps-sebutluas-lahan-pertanian-kian-menurun, diakses tanggal 8 November 2019
- Warta Ekonomi. 2016. Pertumbuhan Ekonomi Tingkatkan Kebutuhan Energi Dalam Negeri. https://www.wartaekonomi.co.id/ read102980/pertumbuhan-ekonomitingkatkan-kebutuhan-energi-dalam-negeri. html, diakses tanggal 8 November 2019
- Wijaya, Taufik. 2019. Forum Diskusi Mongabay:
  Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan Bukan
  Sebatas Luasan. https://www.mongabay.
  co.id/2019/06/01/forum-diskusi-mongabayperhutanan-sosial-di-sumatera-selatanbukan-sebatas-luasan/, diakses tanggal 6
  November 2019
- Wiyanto, Sigit. 2019. Mengukur Dampak
  Pembangunan Infrastruktur. https://ads.
  kontan.co.id/news/mengukur-dampakpembangunan-infrastruktur, diakses tanggal
  29 Oktober 2019
- Wulandari, Dinda. 2019. Lahan Gambut Kabupaten OKI & MUBA Dihantui Karhutla. https://sumatra.bisnis.com/ read/20190704/533/1120129/lahan-gambutkabupaten-oki-muba-dihantui-karhutla, diakses tanggal 6 November 2019
- Wulandari, Dinda. 2018. Sedikitnya 27
  Sengketa Tanah di Sumsel Ditarget Selesai
  Tahun Ini. https://sumatra.bisnis.com/
  read/20180924/533/841590/sedikitnya-27sengketa-tanah-di-sumsel-ditarget-selesaitahun-ini, diakses tanggal 5 November 2019

#### F. Berita dari Internet yang Sudah Tidak Dapat Diakses

- https://ekon.go.id/berita/view/percepatanpembangunan.5008.html, diakses tanggal 27 Oktober 2019
- https://ekon.go.id/press/view/siaran-perspercepatan.5007.html, diakses tanggal 27 Oktober 2019
- https://ekon.go.id/berita/print/reforma-agrariasinkronisasi.3240.html, diakses tanggal 27 Oktober 2019
- https://www.suarantb.com/gaya.hidup/ lingkungan/2018/02/253097/Warga. Trawangan.Kembali.Masuki.Lahan. PT.WAH/, diakses tanggal 2 November 2019
- https://www.suarantb.com/pilihan. editor/2018/11/263626/Blok.Pengelolaan. Hutan.Dicabut,Warga.Protes.Balai. Tahura/, diakses tanggal 2 November 2019
- https://www.suarantb.com/ekonomi.dan. bisnis/2019/08/274713/DPMPTSP.Usulkan. Cabut.Izin.Investasi.Senilai. Rp2,479.Triliun/, diakses tanggal 2 November 2019
- http://arsip.lombokita.com/kabar/tim-terpaduntb-inventarisir-potensi-konflik-2016
- https://www.suarantb.com/ntb/2019/10/279356/ Disorot.Pusat,Realisasi.Belanja.Program. Prioritas.Pengurangan. Kemiskinan.di.NTB/, diakses tanggal 2 November 2019
- https://sumselnews.com/20/12/2018/ketua-dprd-muba-berang-pihak-pt-gpi-tak-hadir-saat-mediasi-penyelesaikan-konflik-bersama-ratusan-warga/, diakses tanggal 5 November 2019
- https://sumselnews.com/06/01/2019/2019bpnkabupaten-muba-bakal-terbitkan-14-000ribu-lebih-sertifikat/, diakses tanggal 5 November 2019

